

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi internet saat ini telah menjadi kebutuhan penting bagi kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Bahkan saat ini, perkembangan teknologi internet yang pesat telah mampu mempengaruhi sektor ekonomi. Akan tetapi, masih terdapat kesenjangan pemakaian teknologi internet pada lembaga publik maupun lembaga non publik di Indonesia. Perkembangan dari teknologi internet membuat masyarakat lebih sering melakukan pertukaran informasi dan komunikasi secara digital. Salah satu bentuk pertukaran informasi itu adalah penyampaian laporan keuangan lembaga pemerintah. Dengan adanya internet diharapkan penyampaian laporan keuangan lembaga pemerintah menjadi lebih efisien dan cepat untuk dapat di akses oleh masyarakat.

Penyampaian laporan keuangan melalui internet, juga dikenal sebagai *Internet Financial Reporting* (IFR), dianggap lebih efektif karena secara langsung memudahkan masyarakat dalam mengaksesnya, dengan itu dapat meningkatkan sikap transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Menurut Masra (2020) karena dianggap lebih cepat dan mudah diakses, pengungkapan laporan keuangan melalui situs website pemerintah dapat membantu pemerintah daerah dalam mengatasi dan menekan biaya monitoring.

Semakin majunya teknologi informasi, akses ke informasi seharusnya semakin mudah. Di sisi lain, Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 mendukung pentingnya memberikan informasi tentang pelayanan sektor publik untuk meningkatkan transparansi. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 menjelaskan dimana badan publik harus bersifat terbuka dan bertanggungjawab atas setiap informasi publik. Maka diperlukan good governance, salah satu caranya adalah dengan membangun situs webnya masing-masing guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Pelaksanaan pertanggungjawaban kepada sesama manusia diwujudkan dalam bentuk penghormatan terhadap hak-hak dan pelaksanaan kewajiban, serta bentuk kecintaan kepada manusia untuk menilai kinerja seseorang terhadap orang lain, kejujuran dan keadilan. Demikian, Allah memerintahkan manusia untuk melakukan hal ini:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: *“Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.”* (Q.S. An-Nisa: 58).

Fenomena terkait pengungkapan *Internet Financial Reporting* (IFR) ini banyak terjadi pada pemerintah provinsi di Indonesia. Putri & Setiawan (2022) menjelaskan bahwa beberapa pemerintah daerah masih belum sepenuhnya mempublikasikan secara utuh dan konsisten terhadap laporan keuangan di website resminya. Namun, sebelumnya telah diberlakukan peraturan melalui Intruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ, yang mewajibkan penyediaan menu Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) di situs web resmi pemerintah daerah.

Dalam beberapa tahun ini, telah terjadi peningkatan jumlah bisnis yang merancang dan memanfaatkan situs web sebagai media publikasi laporan keuangan mereka. Namun, beberapa pemerintah daerah di Indonesia tampaknya belum terlalu memperhatikan hal ini. Verawaty (2015) menyatakan bahwa terdapat kesenjangan antara pemerintah daerah yang telah menggunakan e-government untuk mempublikasikan laporan keuangannya dengan pemerintah daerah yang belum memanfaatkan teknologi internet secara efektif. Efek dari kurangnya perhatian pemerintah daerah pada laporan keuangan dalam situs pemerintahan menyebabkan timbulnya *trust issues* publik kepada pemerintah daerah, yang dalam kasus ini adalah kualitas *internet financial report*.

Internet Financial Report dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya rasio pembiayaan utang, ukuran pemda, dan kinerja keuangan. Disamping itu opini audit juga dapat meningkatkan pemda dalam pengungkapan *Internet Financial Reporting*. Faktor Pertama adalah Ukuran

pemerintah daerah, merupakan salah satu variabel yang dilihat dari besar atau kecilnya pemerintahan suatu daerah yang dapat diukur dengan total aset, jumlah pegawai, total pendapatan dan tingkat produktifitas (Damanpour, 1991). Pemerintah daerah dengan ukuran besar diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada publik. Harapan serta tuntutan terhadap pemerintah daerah akan memacu kinerja pemerintah daerah yang lebih baik.

Rasio pembiayaan utang adalah faktor kedua yang dapat memengaruhi transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Jika pemerintah mulai meminjam dana dari pihak eksternal, mereka harus mempublikasikan keuangan daerahnya sebagai pertanggungjawaban terhadap kreditur. Mereka juga harus memberikan data kepada kreditur untuk menunjukkan tingkat kesanggupan mereka dalam pengembaliannya (Nosihana & Yaya, 2016).

Faktor ketiga adalah kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan menunjukkan seberapa baik suatu daerah menggunakan dan mengelola sumber daya keuangan asli mereka untuk membiayai pembangunan, pelayanan masyarakat, dan sistem pemerintahan. Hal ini akan menunjukkan tingkat kemandirian daerah.

Variabel opini audit akan digunakan sebagai variabel moderasi dalam model penelitian ini. Tuntutan masyarakat agar organisasi sektor publik dapat meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam menjalankan programnya mendorong dilakukannya audit yang

mencakup kinerja dan kepatuhan (Hiola, Rosidi, & Mulawarman, 2015). Diharapkan laporan keuangan yang telah di audit oleh BPK dan mendapat hasil baik berupa opini wajar tanpa pengecualian akan meningkatkan kepatuhan pemerintah daerah dalam mengungkapkan informasi keuangan mereka melalui situs web. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memberikan bukti secara empiris mengenai pengaruh rasio pembiayaan utang, ukuran pemerintah daerah, dan kinerja keuangan daerah terhadap kualitas *internet financial report* pada pemerintah daerah provinsi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga melihat bagaimana pengaruh opini audit pada hubungan antara rasio pembiayaan utang, ukuran pemerintah daerah, dan kinerja keuangan daerah terhadap kualitas *internet financial report* pada pemerintah daerah di Indonesia. Kebaruan dalam penelitian ini adalah penggunaan opini audit sebagai variabel moderasi.

Teknologi informasi sangat mutlak untuk menunjang proses kecepatan, koefisien, dan keefektifan dalam pengelolaan data laporan keuangan. *Internet Financial Reporting* merupakan contoh teknologi informasi yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah guna menciptakan sikap transparansi pemerintah daerah terhadap pelaporan keuangan dan membantu masyarakat dalam pencarian informasi tentang laporan keuangan daerah.

Seiring dengan dikeluarkannya undang-undang dan peraturan pemerintah terkait penyampaian informasi kepada publik, pemerintah

daerah seharusnya telah menggunakan internet sebagai media untuk menyampaikan laporan keuangan. Pada saat ini terdapat 34 provinsi dari 37 provinsi yang telah memiliki website di Indonesia, dimana 3 provinsi yang belum memiliki website adalah Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan yang merupakan provinsi baru pemekaran dari provinsi Papua pada bulan Juli tahun 2022. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Darmesta Hadianto & Alek Murtin (2020). Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian menggunakan sampel seluruh provinsi di Indonesia guna membuktikan apakah IFR sudah digunakan dengan baik oleh pemda di Indonesia dan juga menambahkan kinerja keuangan sebagai variabel independen serta opini audit sebagai pemoderasi. Penelitian ini diharapkan dapat membuktikan faktor yang mendukung dalam pelaksanaan dan kualitas *Internet Financial Reporting* pada pemerintah daerah di Indonesia.

Berlandaskan latar belakang yang telah disusun diatas, makapeneliti akan melaksanakan penelitian yang berjudul “Pengaruh Rasio Pembiayaan Utang, Ukuran Pemerintah Daerah, Dan Kinerja Keuangan Terhadap Kualitas *Internet Financial Reporting* Dengan Opini Audit Sebagai Pemoderasi” (studi empiris pada provinsi di Indonesia). Penelitian ini diharapkan dapat membuktikan faktor yang mendukung terhadap kualitas *Internet Financial Reporting* pada pemerintah daerah di Indonesia, serta meningkatkan kesadaran terhadap faktor pendukung atau penghambat dalam penerapan *Internet Financial Reporting* pada pemerintah daerah di

Indonesia menggunakan tinjauan-tinjauan hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, penelitian ini ingin mengevaluasi beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas *Internet Financial Reporting* pada instansi pemerintah daerah.

1. Apakah Rasio pembiayaan utang Pemerintah Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas *Internet Financial Reporting* Pemerintah Daerah.
2. Apakah Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas *Internet Financial Reporting* Pemerintah Daerah.
3. Apakah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas *Internet Financial Reporting* Pemerintah Daerah
4. Apakah Opini Audit memperkuat pengaruh Rasio pembiayaan utang pemerintah daerah, Ukuran pemerintah daerah, dan Kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap kualitas *Internet Financial Reporting* pada Pemerintah Daerah di Indonesia.

C. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah , dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji seraca empiris pengaruh Rasio pembiayaan utang Pemerintah Daerah terhadap kualitas *Internet Financial Reporting* Pemerintah Daerah.
2. Untuk menguji seraca empiris pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap kualitas *Internet Financial Reporting* Pemerintah Daerah.
3. Untuk menguji seraca empiris pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap kualitas *Internet Financial Reporting* Pemerintah Daerah.
4. Untuk menguji seraca empiris pengaruh Opini audit pada Rasio pembiayaan utang pemerintah daerah, Ukuran pemerintah daerah, dan Kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap kualitas *Internet Financial Reporting* Pemerintah Daerah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor yang berpengaruh terhadap kualitas *Internet Financial Reporting* Pemerintah Daerah di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan tentang faktor yang mempengaruhi kualitas *Internet Financial Reporting* Pemerintah Daerah di Indonesia dan diharapkan juga bisa mengetahui kinerja pemerintah daerah di Indonesia.

b) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikakn kontribusi dalam pengembangan teori mengenai faktor yang mempengaruhi kualitas *Internet Financial Reporting* dalam instansi pemerintah daerah.

c) Bagi Pemerintah atau Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi instansi atau pemerintah untuk mengetahui faktor yang dapat meningkatkan kualitas dari *Internet Financial Reporting*.